



PERNYATAAN SIKAP
Nomor: 013/03/2026

Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi

Mengenai

**PARTAI MENDESAK PRESIDEN PRABOWO
MENINJAU ULANG PERJANJIAN DAGANG ART
(AGREEMENT OF RESIPROCAL TRADE)**

Bismillahirrahmanirrahim

Masih dalam ketidakpastian akan manfaat bergabungnya Indonesia ke Board of Peace, tiba-tiba Presiden Prabowo menandatangani *Agreement on Reciprocal Trade* (ART). Sungguh sangat mengkhawatirkan dan mengundang risiko yang membahayakan. Kebijakan itu diambil di tengah Asta Cita Pemerintahan yang menargetkan ekonomi Nasional tumbuh 8% per tahun; hal ini menjadi "seperti mengadu nasib" yang berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi, hukum, dan sumber daya negara untuk kepentingan asing.

Di sisi lain, serangan terbuka Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran di tengah gencatan senjata Israel-Palestina, yang menewaskan pemimpin Ayatullah Khamanei, sungguh melanggar hukum Internasional dan sangat membuat amarah dunia, dan diyakini akan bereskalasi menjadi Perang Dunia III, yang akan berdampak pada ekonomi dalam negeri dan masa depan Indonesia. Dalam situasi seperti itu, maka DPP Partai Masyumi menyampaikan hal-hal mendasar, sebagai berikut:

PANDANGAN STRATEGIS PARTAI MASYUMI

Partai Masyumi meyakini bahwa peran "Bebas Aktif" Indonesia untuk ikut menertibkan dunia dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, adalah amanah konstitusi (UUD1945) yang harus dijalankan. Namun keputusan besar oleh Presiden yang berdampak luas pada eksistensi kedaulatan negara dan mempengaruhi hajat hidup seluruh rakyat, haruslah mendapatkan persetujuan DPR. Dengan kata lain, kebijakan itu tidak bisa diambil sebagai keputusan yang tiba-tiba, tanpa mendapat masukan dari seluruh komponen bangsa.

Partai Masyumi juga meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia yang sejati bukan sekadar lepas dari penjajahan fisik, tapi kedaulatan penuh untuk mengatur ekonomi sendiri tanpa didikte dan tersandra oleh kepentingan asing. Maka perjanjian ART yang jelas-jelas membelenggu Indonesia dalam instrumen fiskal, tarif, dan kebijakan perlindungan industri nasional melalui 217 kewajiban (*shall*) adalah bentuk penjajahan ekonomi, yang akan menjauhkan cita-cita kesejahteraan umum. Ekonomi Indonesia harus diletakkan sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kedaulatan, di mana negara memiliki hak mutlak untuk memihak pada kepentingan rakyatnya sendiri, di atas kepentingan asing.

Kami memandang bahwa struktur perjanjian ART itu mencerminkan mentalitas Indonesia sebagai "inlander" yang inferior, di mana posisi tawar Indonesia diletakkan jauh di bawah kepentingan AS melalui komitmen belanja agregat yang timpang. Pertukaran antara akses pasar komoditas mentah Indonesia dengan penguasaan pasar manufaktur teknologi tinggi serta pangan strategis AS adalah pola kolonialisme gaya baru yang akan memiskinkan generasi mendatang. Diplomasi ekonomi seharusnya dibangun di atas prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (*reciprocal* yang sejati).

Partai Masyumi berkeyakinan bahwa hilirisasi industri, swasembada pangan, perlindungan atas pasar domestik bagi produk local dan kemandirian energi adalah pilar utama kekuatan nasional yang tidak boleh dikompromikan dengan dalih perdagangan bebas. Pelumpuhan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) serta

pemaksaan kuota impor gandum, kedelai, dan jagung secara sistematis (sebagaimana diatur dalam ART), akan menghancurkan basis ekonomi petani dan pengusaha lokal Indonesia. Seharusnya negara wajib hadir juga sebagai perisai bagi industri local pemula (*infant industry*) agar mereka memiliki ruang untuk tumbuh, berinovasi, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri tanpa harus mati di hadapan serbuan produk asing yang masuk tanpa beban bea masuk.

Partai Masyumi meyakini bahwa era digital adalah wajah kedaulatan bangsa, yang pengelolaan datanya tidak boleh diserahkan kepada pihak asing tanpa kontrol yurisdiksi. Larangan lokalisasi data dan audit kode sumber teknologi (yang tertuang di dalam ART) adalah upaya penggeledahan digital yang melucuti hak privasi serta keamanan nasional Indonesia. Demikian pula dengan sertifikasi dan jaminan produk halal, bukan sekadar komoditas dagang, melainkan cerminan identitas budaya dan penjaga moralitas publik yang harus dilindungi, yang fakta hukumnya diabaikan dalam ART.

TUNTUTAN TEGAS PARTAI MASYUMI

Berdasarkan pandangan tersebut, maka Partai Masyumi, sebagai penyambung lidah umat dan penjaga nilai-nilai Islam-Keindonesiaan, menyampaikan tuntutan tegas sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang semua komitmen dalam *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) guna memulihkan kedaulatan absolut Negara Indonesia atas tarif impor, pangan, energi, dan data nasional, serta menolak segala bentuk diplomasi asimetris (timpang), yang melumpuhkan hilirisasi dan industri dalam negeri, demi tegaknya kemandirian ekonomi bangsa.
2. Mendesak Pemerintah untuk kembali pada khittah Asta Cita demi mewujudkan pertumbuhan 8% yang mandiri dan bermartabat; dengan cara menggenjot hilirisasi, membentengi pasar domestik bagi produk nasional, serta mengerem laju impor komoditas pertanian dan barang jadi teknologi. Pemerintah harus fokus mencegah pengurasan aset sumber daya alam yang demi kepentingan industri asing, dan sebaliknya wajib memacu industrialisasi berbahan baku lokal yang kompetitif dan berorientasi ekspor, guna tegaknya kesejajaran ekonomi Indonesia di tingkat global.
3. Mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan akselerasi pertumbuhan UMKM dan Koperasi, sebagai pilar utama industri berskala nasional dan berorientasi ekspor. Hal ini krusial guna merestrukturisasi fundamental ekonomi nasional yang masih timpang dan rapuh, di mana para pelaku usaha rakyat masih tanpa jaminan pasar maupun akses permodalan yang cukup untuk bertumbuh, berekspansi, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi pemain di tingkat global.
4. Menuntut Pemerintah untuk merevisi ulang seluruh komitmen perjanjian ART dan menghentikan semua bentuk diplomasi yang mengancam kedaulatan rakyat. Semua kebijakan yang berdampak luas, bersifat eksistensial bagi kedaulatan negara, dan mengikat hajat hidup orang banyak secara berkelanjutan, wajib melibatkan DPR RI serta seluruh komponen bangsa, dengan pembahasan yang transparan dan partisipatif, guna memastikan bahwa setiap keputusan nasional lahir dari kehendak rakyat, bukan dari pemaksaan agenda ekonomi kekuatan asing.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Partai Masyumi akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berada pada rel konstitusi yang benar dan tidak terjebak dalam pragmatisme politik internasional yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

Jakarta, 15 Maret 2026

Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi



Dr. Ahmad Yani, SH., MH
Ketua Umum

Samsudin Dayan, SH., M.Si
Sekretaris Jenderal